

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara atau daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat sehingga terwujudlah kesejahteraan yang dapat dirasakan dari faktor-faktor pembangunan ekonomi tersebut seperti, Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), ilmu pengetahuan & teknologi, modal, sosial budaya dan lainnya. Kehadiran manusia yang merupakan pemeran utama dalam pembangunan ekonomi tentunya sangat diperlukan karena sebagai pengelola dan penikmat dari pekerjaan-pekerjaan yang akan, sedang ataupun telah dilakukan. Manusia sebagai pengelola dapat menandakan bahwa ia adalah tenaga kerja atau subjek di dalam proses pembangunan, sedangkan manusia sebagai penikmat dapat menandakan bahwa ia adalah tenaga kerja atau objek dari proses pembangunan tersebut yang perlu disejahterakan. Tan Goan Tiang (1965) dalam buku Konsep Dasar Tenaga Kerja berpendapat bahwa tenaga kerja (*man power*) merupakan besarnya jumlah dari penduduk yang dapat ikutserta dalam proses ekonomi.

Permasalahan ketenagakerjaan yang pada umumnya terjadi dalam di negara-negara berkembang seperti Indonesia adalah ketidakseimbangan antara jumlah penduduk yang tinggi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang berujung pada bertambahnya potensi pengangguran dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Tambunan (2009:201) mengatakan bahwa :

Pertumbuhan ekonomi yang tidak diiringi oleh penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (*ceteris paribus*), yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan disertai pengangguran.

Kualitas dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang dicerminkan oleh keterampilan dan sikap dapat mempengaruhi layak atau tidaknya dia mendapatkan pekerjaan. Berbagai daerah di Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Utara mempunyai masalah ketengakerjaan yang hampir sama seperti pada umumnya. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah tentunya sangat berpengaruh terhadap penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan tersebut melalui kebijakan ataupun peraturan yang ditetapkan.



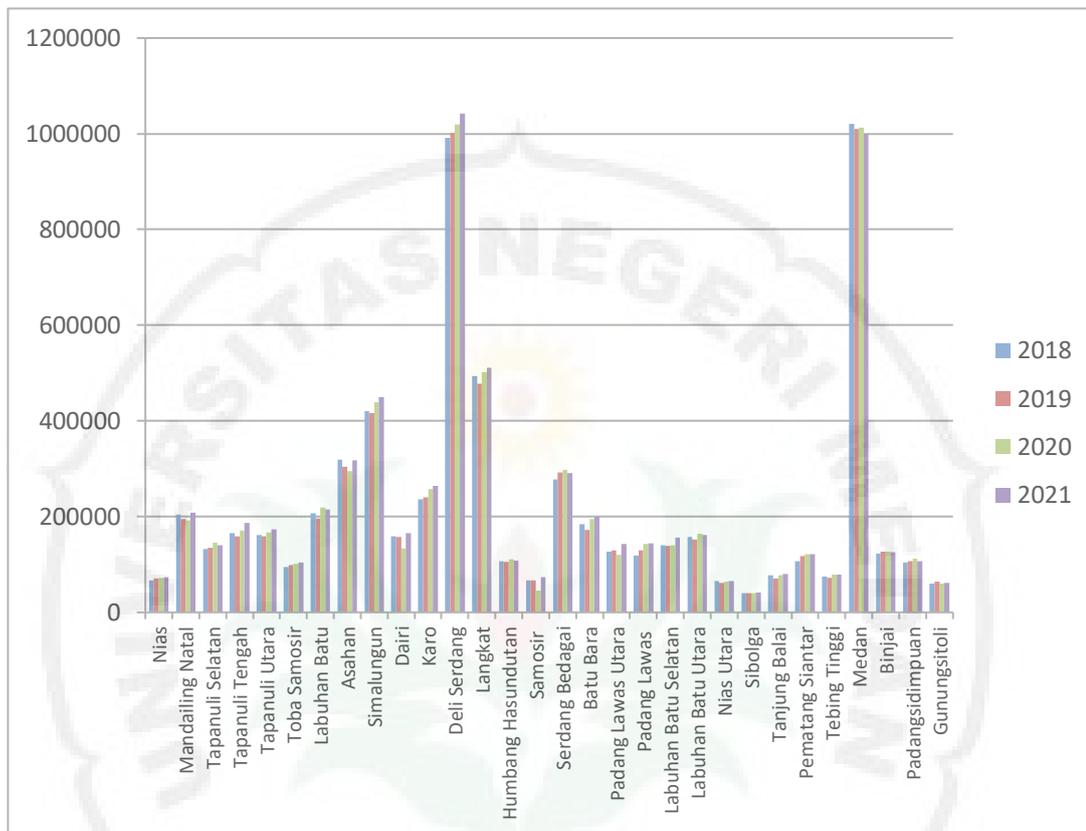
Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (Data Sekunder)

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan jumlah

penduduk sebesar 520.757 jiwa dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2018-2021). Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya, maka pemerintah Sumatera Utara harus mampu pula meningkatkan kesejahteraan penduduknya tidak hanya dengan memberikan bantuan secara langsung melainkan juga dengan peningkatan kualitas SDM agar berdaya saing tinggi dan mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga dapat menghasilkan produk dan mempunyai pendapatan tetap. Melalui pembangunan ekonomi diharapkan laju pertumbuhan ekonomi dapat selalu dipertahankan pada tingkat yang lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk, sehingga kegiatan perekonomian akan menjadi lebih luas dan selanjutnya dapat memperkecil jumlah orang yang menganggur.



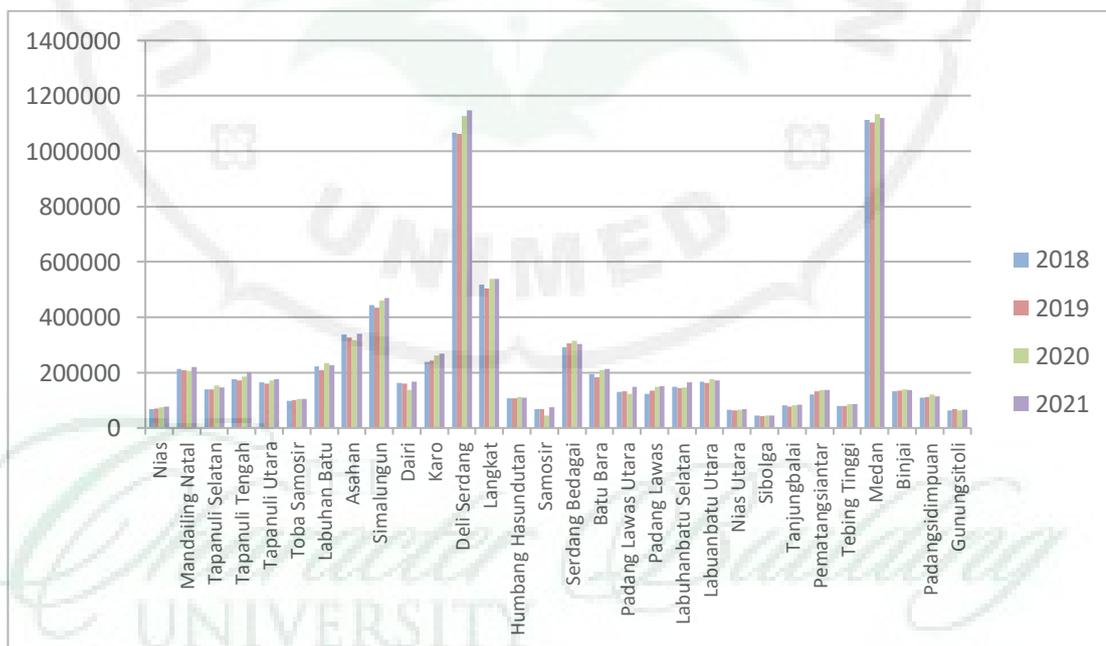


Gambar 1.2 Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (Data Sekunder)

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang memiliki jumlah penduduk yang bekerja paling banyak dalam rentang waktu empat tahun terakhir (2018-2021), cukup jauh apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, hal tersebut sejalan dengan jumlah penduduk di dua daerah tersebut merupakan yang paling banyak di Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan daerah dengan jumlah penduduk yang bekerja paling sedikit selama empat tahun terakhir (2018-2021) adalah Kota Sibolga dan Kota Gunungsitoli. Hal itu juga sejalan dengan jumlah penduduk di kedua daerah tersebut sedikit. Jumlah tenaga kerja di berbagai kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara

mayoritas memang mengalami fluktuasi dengan tahun 2019 merupakan tahun menurunnya jumlah penduduk yang bekerja diakibatkan oleh jumlah angkatan kerja yang menurun juga tetapi setelah itu mengalami peningkatan kembali hingga tahun 2021. Peningkatan penyerapan tenaga kerja terjadi di masa pandemi COVID-19 yaitu tahun 2020, hal itu dikarenakan adanya total investasi sebesar Rp 826, 3 triliun serta diiringi oleh strategi yang mumpuni seperti yang dipaparkan oleh Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/ Kepala BKPM. Seperti yang dikemukakan oleh Mulyadi (2003) bahwa angkatan kerja mempengaruhi penyerapan tenaga kerja karena angkatan kerja benar-benar ikut atau berusaha ikut serta dalam kegiatan produktif, yaitu produksi barang dan jasa.

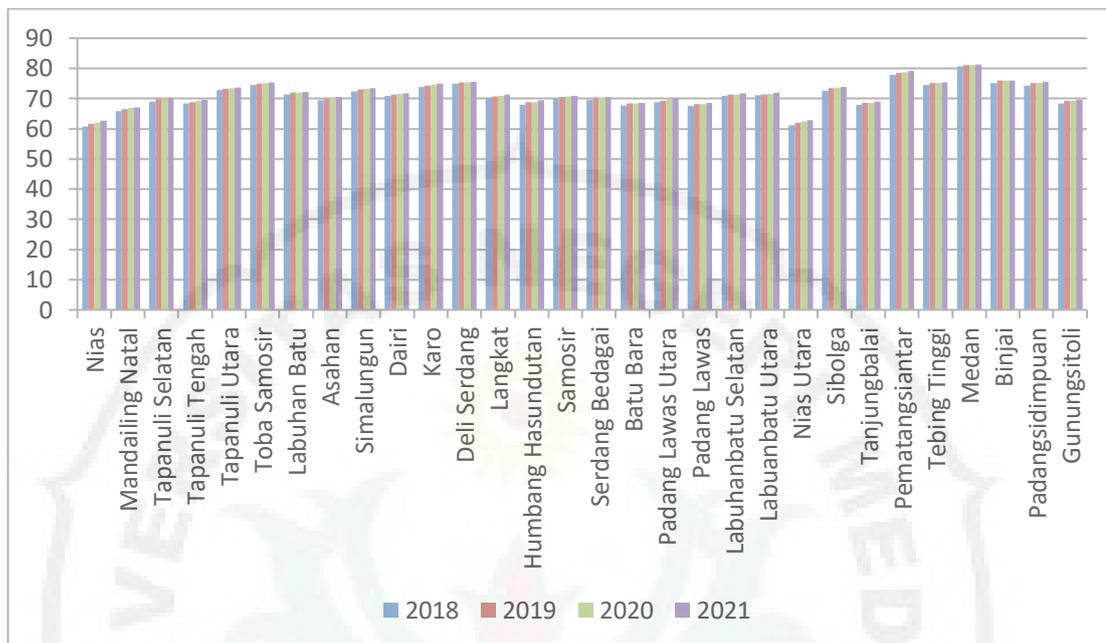


Gambar 1.3 Jumlah Angkatan Kerja 15 Tahun Keatas Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (Data Sekunder)

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang tetap menjadi daerah dengan jumlah yang tertinggi dalam hal ini angkatan kerja. Sedangkan daerah dengan jumlah angkatan terendah adalah Kota Sibolga dan juga Kota Gunungsitoli. Sama dengan jumlah penduduk yang bekerja, angkatan kerja di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara bergerak fluktuatif dengan mayoritas pada tahun 2019 mengalami penurunan akibat tidak seimbangnya dengan jumlah perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan sehingga memperkecil kesempatan bekerja ataupun mencari pekerjaan. Apabila angkatan kerja menurun dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah ke arah yang negatif karena menandakan semakin sedikit orang yang bekerja ataupun semakin banyak orang yang tidak bekerja.

Angkatan kerja juga harus dibarengi dengan kualitas manusianya, jika kualitas manusianya semakin baik, maka kemungkinan mereka untuk mendapatkan pekerjaan akan semakin besar, begitu juga dengan sebaliknya. Kualitas manusia atau angkatan kerja dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

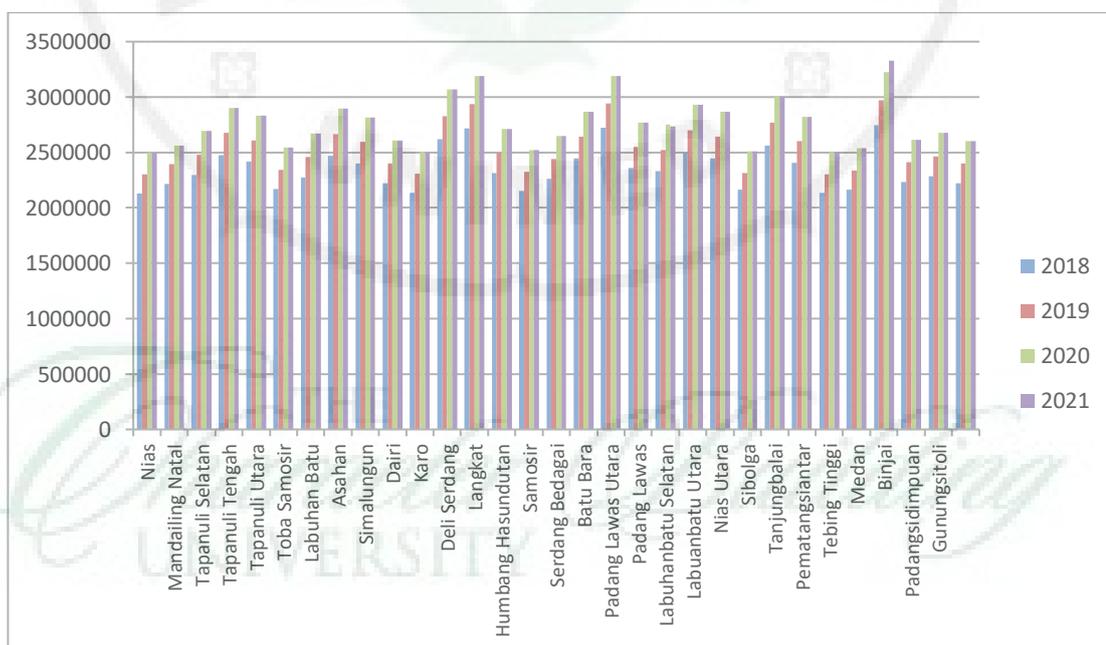


Gambar 1.4 Angka Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (Data Sekunder)

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa angka IPM di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara selama empat tahun terakhir (2018-2021) kebanyakan masih berada dibawah angka rata-rata IPM secara nasional. Dari 30 kabupaten/kota yang ada, sebanyak 18 kabupaten/kota masih tergolong rendah dan dibawah rata-rata nasional. Yang menyebabkan masih rendahnya angka IPM di banyak daerah adalah kurangnya perhatian pemerintah atau pemerataan terhadap program bagi masyarakat miskin yang mempengaruhi kesehatan, pendidikan dan kehidupan yang layak bagi mereka. IPM dicerminkan oleh umur panjang sehingga diketahui bagaimana kualitas kesehatan serta nutrisi yang masuk ke dalam tubuh yang akibatnya dapat mempengaruhi bagaimana mereka mendapatkan pekerjaan serta melakukan pekerjaan. Kemudian tingkat pendidikan sehingga diketahui angka

melek huruf dan rata-rata lama sekolah, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka kecenderungan untuk mendapatkan pekerjaan akan semakin pula begitu juga dengan sebaliknya seperti yang dikemukakan oleh Mulyadi (2003). Dan yang terakhir yaitu standar hidup sehingga diketahui pendapatan perkapita dan kelangsungan hidupnya. Akibat dari angka IPM yang rendah dapat melahirkan generasi yang kurang berkualitas secara kesehatan dan intelektual sehingga berpengaruh terhadap peningkatan gizi buruk, pengangguran, kemiskinan, serta usia lama hidup yang berkurang. Upah minimum dapat menjadi faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dengan kondisi upah minimum di setiap daerah yang tentunya berbeda karena ditentukan oleh berbagai faktor termasuk kualitas sumber daya manusia dan produktivitasnya.



Gambar 1.5 Upah Minimum Kabupaten/Kota Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (Data Sekunder)

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa UMK di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan pada tahun 2021 tidak meningkat karena mengikuti peraturan pemerintah pusat melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/11/HK.04/2020. Adapun alasan dibalik tidak adanya kenaikan UMP tahun 2021 adalah lesunya ekonomi akibat pandemi COVID-19, menurunnya pendapatan perusahaan dan merupakan keputusan antara pengusaha dan buruh. Upah minimum dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan disepakati oleh tiap-tiap daerah melalui regulasi pemerintah yang dipengaruhi oleh kondisi pasar, kemampuan perusahaan, produktivitas pekerja dan kualitas sumber daya manusianya. Ehenberg (2003) menjelaskan bahwa hubungan upah mempunyai hubungan yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja karena apabila upah rata-rata pekerja meningkat, maka jumlah tenaga kerja yang diminta perusahaan akan menurun.

Berdasarkan penjelasan dan informasi yang disampaikan di atas, dengan ini peneliti berkeinginan untuk meneliti serta mengembangkan lebih lanjut bagaimana faktor-faktor yang dipercaya dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja meliputi angkatan kerja, indeks pembangunan manusia dan upah minimum kabupaten/kota. Sehingga judul penelitian yang diangkat peneliti adalah **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Terjadinya penurunan jumlah penduduk yang bekerja dari tahun 2018-2019.
2. Terjadinya penurunan angkatan kerja dari tahun 2018-2019.
3. Masih banyaknya kabupaten/kota dengan angka IPM dibawah rata-rata nasional.
4. Tidak adanya peningkatan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota pada tahun 2021.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini lebih jelas dan terarah, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini menggunakan variabel Jumlah Penduduk yang Telah Bekerja, Angkatan Kerja, IPM dan UMK.
2. Data untuk faktor-faktor penelitian ini diambil dari 30 kabupaten/kota dari jumlah total 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara karena keterbatasan data Upah Minimum Kabupaten/Kota yang tidak disediakan oleh kabupaten Nias Barat, Nias Selatan dan Pakpak Bharat.
3. Data yang dipakai adalah data tahunan dalam kurun waktu tahun 2018-2021.
4. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel karena menggabungkan data *time series* dan data *cross section*.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah yang telah dipaparkan, maka yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh Angkatan Kerja terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara?
3. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara?
4. Bagaimana pengaruh Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota secara bersamaan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana pengaruh Angkatan Kerja terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
2. Mengetahui bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
3. Mengetahui bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
4. Mengetahui bagaimana pengaruh Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) secara bersamaan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik penulis sendiri maupun orang lain. Adapun manfaat yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan, menjadi bahan referensi pembelajaran serta menjadi rujukan perbandingan bagi penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi mahasiswa untuk meningkatkan kualitas dirinya sehingga dapat bersaing dalam mendapatkan pekerjaan kedepannya ataupun membuka usaha sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan telah berkontribusi terhadap negara serta memotivasi agar terus belajar mengetahui atau menggali informasi/pengetahuan tentang dunia tenaga kerja dan kaitannya ke perekonomian.

b. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmu bagi mahasiswa, sekaligus menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk mahasiswa di perguruan tinggi akan pentingnya peran pemerintah dalam membuka kesempatan

lapangan pekerjaan dan peran diri sendiri untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

c. Bagi Penulis

- Menjadi batu loncatan untuk meningkatkan kemampuan atau kualitas diri sendiri agar siap menjadi tenaga kerja yang berkualitas ataupun membuka lapangan pekerjaan setelah mengetahui banyak hal.
- Upaya untuk menyelidiki bahwa apa saja yang faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.
- Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Negeri Medan.

d. Bagi Pihak Berikutnya

- Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dan nilai tambah di kalangan akademik Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan dan secara khusus bagi Program Studi Ilmu Ekonomi dalam mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.
- Sebagai referensi civitas akademik Universitas Negeri Medan ataupun pihak-pihak lainnya secara umum dalam penelitian yang ingin mengkaji masalah yang sama atau mirip di masa mendatang.

e. Bagi Pemerintah/Instansi Terkait

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi atau masukan dalam membuat suatu keputusan/kebijakan

yang tepat dalam penyelesaian masalah ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara.

